

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Semarang

Halaman 14

## Bantuan Untuk Parpol Wajib Dilaporkan

**UNGERAN**--Setiap partai politik (parpol) wajib memberikan laporan bantuan parpol secara kongkrit dan detil. Hal ini untuk meningkatkan tertib administrasi dalam setiap bantuan dari pemerintah.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Partai Politik (Kesbangpol), Haris Pranowo menyatakan tahun 2017 ini ada 9 parpol yang mendapatkan bantuan dari APBD 2017 Kabupaten Semarang, dengan total anggaran sekitar Rp 1,115 miliar.

"Saat ini baru tujuh dari sembilan parpol yang mengaju-

kan dana bantuan parpol, dua parpol lainnya akan menyusul," ujar Haris dalam sosialisasi perencanaan dan laporan dana Bantuan Parpol di Ungaran, Senin (31/7).

Dana ini kemudian dibagi ke parpol berdasarkan jumlah perolehan suara pada pemilihan legeslatif 2014 lalu.

"Satu suaranya dihitung Rp 2016, dikali perolehan suara tiap parpol," katanya.

Hal yang perlu dilakukan oleh para pengurus parpol diantaranya penyusunan rencana kerja alokasi dana bantuan ini.

Karena setiap alokasi bantuan parpol harus sesuai dengan rencana kerja yang telah diajukan ke Kesbangpol.

Jika merujuk Aturan Permendagri nomor 6/2017 tentang penyaluran dan laporan pertanggungjawaban bantuan parpol. Alokasi dana bantuan parpol ini juga lebih diutamakan untuk kegiatan pendidikan partai politik, seperti kaderisasi, dialog dan diskusi.

Sementara untuk alokasi anggaran operasional kesekretariatan hanya sebesar 40 persen dari alokasi anggaran.

Kesekretariatan ini seperti rapat internal, dan keperluan alat tulis kantor.

"Pengalokasian anggaran pendidikan parpol harus lebih besar daripada kesekretariatan, dan pengeluaran jasa," ujar Haris.

Pelaporan anggaran juga harus tertulis secara detil dan runtut, sesuai dengan aturan pembukuan administrasi yang berlaku.

Karena informasi administrasi yang detil untuk akan mempermudah pengawasan. (rie/aim)